

## Data Perdagangan Orang September 2014

*Homo homini lupus!* Eksploitasi manusia oleh manusia lain tergambar jelas dalam salah urus buruh migran (domestik dan internasional). Penganiayaan Nirmala Bonat (2004), maupun Wilfrida Soik (2011) yang terancam hukuman mati tidak lepas dari maraknya praktek *human trafficking* di NTT. Nirmala Bonat diduga masih dalam kategori anak ketika dikirim, dan Wilfrida Soik terbukti bahwa ia masih anak-anak, dan identitasnya dipalsukan. Secara umum, jumlah buruh migran dari NTT bukan yang terbanyak di Indonesia, tetapi angka *trafficking* dari NTT menurut data Bareskrim Polri tertinggi di Indonesia.

Sejak Februari 2014, kasus perdagangan orang telah menjadi 'titik api' protes gerakan masyarakat sipil di NTT. Dua orang warga asal Kabupaten Timor Tengah Selatan meninggal dalam perbudakan dalam industri sarang burung walet di Medan, Sumatra Utara. Perbudakan di sini bukan dalam arti kiasan (*as if*), tetapi seperti yang sesungguhnya terjadi (*as it is*). Sayangnya para pejabat Polda di NTT tidak tergerak mengusut lebih lanjut, hingga munculnya Rudy Soik sebagai *whistleblower*. Itu pun kini dikriminalkan, tanpa mengusut lebih lanjut.

DPO (Data Perdagangan Orang) IRGSC merupakan bagian dari upaya menjaga ingatan. Satu dekade pasca kasus Nirmala Bonat terbukti penanganan buruh migran tidak semakin baik, sebaliknya semakin diterlantarkan di kampung halaman sendiri, oleh berbagai institusi pemerintah, maupun para pelaku dari sektor privat (PPTKIS maupun para PL (Petugas Lapangan))

Penerbitan DPO IRGSC adalah bagian dari pengembangan NTT Studies oleh IRGSC (*Institute of Resource Governance and Social Change*) NTT. Peneliti: Arif Rahman, Juwita Boboy, Randy Banunaek, Ragil Supriyanto Samid, Gregorius Aviero, Rosna Bernadetha, Yadi Diaz, John Petrus Talan, dan D.Elcid Li. Riset ini merupakan bagian dari riset aksi yang dilakukan IRGSC dalam **Ampera (Aliansi Menolak Perdagangan Orang)** yang melibatkan berbagai elemen seperti: JPIT (Jaringan Perempuan Indonesia Timur), PIAR (Pusat Informasi Advokasi Rakyat), Rumah Perempuan, JRUK (Jaringan Relawan Untuk Kemanusiaan) maupun secara individual.

## DAFTAR ISI

Ringkasan Umum September 2014 .....	6
Analisa Data Media .....	6
Pelanggaran tertinggi .....	7
Posisi Media terhadap <i>Trafficking</i> .....	8
Daftar Perusahaan yang Perlu Diawasi .....	9
Daftar Lembaga Publik yang Perlu Diawasi: .....	14
Daftar Singkatan .....	15
Ringkasan Berita Media Cetak .....	17
Selasa, 30 September 2014 .....	17
Ampera Temui DPRD NTT (VN, hal.2) .....	17
Calon TKI Asal Sumba Kabur Dari Penampungan (VN, hal.9).....	18
Yohana Dikenakan Wajib Lapori (PK, hal.10) .....	19
Senin, 29 September 2014 .....	19
Sebelas TKI Ilegal Digagalkan (PK, hal.10) .....	19
Sabtu, 27 September 2014 .....	20
11 Orang TKW Ilegal Asal Sumba Diamankan (VN, hal.9) .....	20
Senin, 22 September 2014 .....	21
Cegah TKI Manfaatkan Potensi Daerah (VN, hal.3).....	21
Minggu, 21 September 2014.....	21
Harkat Manusia Tak Seperti Barang Jualan (TE, hal 1 & 5) .....	21

Tangkal Trafficking Ubah Regulasi (TE, hal.1 & 5).....	22
Kamis, 18 September 2014 .....	22
Satgas Penanganan TKI Harus Konsisten (VN, hal.2) .....	22
Terdakwa Menangis di pengadilan (PK, hal.3) .....	22
Rabu, 17 September 2014.....	22
Dua Calon TKI Pingsan (PK, hal.1 & 7).....	22
Siswi SMA Dijual Rp 300 Ribu (PK, hal.9 &15).....	23
Selasa, 16 September 2014 .....	24
Tidak ada Bukti Penyelesaian (TE, hal.9 & 10).....	24
BP3TKI: Harusnya LSM Koordinasi Sebelum Grebek (TE, hal.9 & 10) .....	25
Cabut izin Perusahaan Bermasalah (PK, hal.3) .....	25
“Mami” Mira Jadi Tersangka (VN, hal.14).....	26
Senin, 15 September 2014 .....	26
Gereja Kecam Perdagangan Manusia (VN, hal.3) .....	26
25 Calon TKI Diperiksa Maraton (PK, hal.1 & 7).....	28
DPRD minta Polisi Segel PT TDP (PK, hal.1 &7) .....	28
Human Trafficking (PK, hal.7).....	29
PT. Total Data Persada dan APJATI (TE, hal.9 & 10).....	29
Minggu, 14 September 2014.....	30
Polisi grebek 26 calon TKI (PK, hal.8) .....	30
Sabtu, 13 September 2014.....	31
Polisi Dalam Kubangan Trafficking (VN, hal.1).....	31
Polisi Loloskan 30 TKI Ilegal (VN, hal.1).....	31
Sindiket Gandeng Oknum Polisi (VN, hal.1) .....	32

Irwasda Polda Pasrah (VN, hal.1) .....	32
Selasa, 9 September 2014 .....	32
Perjuangan Brigpol Rudy Soik Membuahkan Hasil (VN) .....	32
Senin, 8 September 2014 .....	33
AMPERA Siapkan Gerakan Solidaritas Akbar (VN) .....	33
Minggu, 7 September 2014 .....	33
Pertarungan Hati Nurani di Polda NTT Brigpol vs Kombes (VN) .....	33
Kado Buat Tuan Kapolda NTT (VN) .....	33
Sabtu, 6 September 2014.....	33
Soik Tidak Dikenai Tindakan Disiplin (PK, hal.5).....	33
Hargai Niat Baik Brigpol Rudy Soik (VN, hal.3).....	34
Rudi Soik Bebas Saksi (VN, hal.1) .....	34
Jumat, 5 September 2014 .....	34
Dewan Baru Janji Perangi Human Trafficking (VN, hal.1) .....	34
Mabes Polri: Kasus TKI Belum Berhenti (TE, hal.1 &3).....	34
Bersihkan Oknum Polisi Bermasalah (TE, hal.3).....	34
Kapoda Didesak Tindak Pengirim TKI (PK) .....	35
Kamis, 4 September 2014 .....	35
Polda NTT Harus Transparan (PK, hal.3) .....	35
Penampungan TKI Digerebek (PK, hal.1 &7) .....	35
Sekamar Tidur 30 Orang (PK, hal.7) .....	35
Polda Hentikan Kasus “Penjualan Manusia” (PK, hal 1& 7) .....	36
Rabu, 3 September 2014.....	36
Jadikan Human Trafficking Musuh Bersama (VN, hal, 1) .....	36

Kapolri Buka Hasil Gelar Kasus 52 TKI di Mabes Polri (PK, hal 1& 7) .....	36
Okto: Bukan Penghentian Penyelidikan (PK, hal.7).....	36
Selasa, 2 September 2014 .....	37
10 Ribu Tanda Tangan Dukung Rudy Soik (VN, hal. 1) .....	37
Suara-suara Dukungan Untuk Brigpol Rudi Soik (VN, hal.3) .....	37
Masalah Trafficking PR bagi Dewan Baru (VN, hal.3).....	37
Polres Kupang Kota Lanjutkan Kasus Calon TKI PT Malindo (PK, hal 7) .....	37
Senin, 1 September 2014 .....	38
Periksa Dirkrimum Polda NTT (PK, hal. 1 & 7).....	38
Sam: Apa Salah Saya (PK, hal 1 & 7).....	38
Rudi Soik Dikenakan Tindakan disiplin (PK, hal 1 & 7) .....	38
Dukung Rudi Bongkar Mafia Trafficking (VN, hal.1).....	38

## RINGKASAN UMUM SEPTEMBER 2014

DPO IRGSC Edisi September memuat 50 berita terkait perdagangan orang. DPO adalah publikasi reguler yang berisikan ringkasan berita di tiga media harian utama di NTT yakni *Pos Kupang* (PK), *Timor Express* (TE) dan *Victory News* (VN) yang memuat persoalan seputar migrasi tenaga kerja, khususnya yang terkait dengan perdagangan orang (*human trafficking*) baik di lingkup domestik maupun internasional.

Berita utama di Bulan September masih terkait laporan Briptu Rudy Soik, penyidik Direktorat Kriminal Khusus (Diskrimsus) Polda NTT ke Mabes Polri. Laporan ini terkait dengan dugaan keterlibatan pimpinannya dalam kasus *Human Trafficking*, karena Dirkrimsus Polda NTT menghentikan secara sepihak proses penyelidikan terhadap kasus pengiriman TKI yang dilakukan oleh PT. Malindo Mitra Perkasa. Selain ke Mabes Polri ia juga melaporkan penyelewengan ini ke Komnas HAM, Ombudsman RI, Mabes Polri, DPR RI dan LPSK.

Secara umum posisi *whistleblower* pun mengundangi pro dan kontra dalam institusi. Di satu sisi *whistleblower* menjadi bukti adanya 'salah prosedur' dan penyimpangan, tetapi dari sisi pro status quo munculnya *whistleblower* dianggap hanya mengurangi 'wibawa institusi'. Kasus *whistleblower* dari tubuh institusi kepolisian dalam perdagangan manusia memang amat langka, padahal kinerja kepolisian termasuk yang paling disorot. Suara publik terkait Solidaritas terhadap Brigpol Rudy Soik salah satunya difasilitasi oleh penyampaian petisi melalui [change.org](http://change.org).<sup>1</sup> Laporan Brigpol Rudy Soik ke Mabes Polri disusul dengan mutasi pejabat Polda NTT, masing-masing Kapolda NTT Ketut Untung Yoga Ana diganti dengan Wakapolda Aceh Brigjen Endang Sunjaya, yang juga merupakan bekas Kepala Provost Polri. Sedangkan Wakapolda NTT dari Kombespol Monang Manulang diganti dengan Kombespol Kombes Pol Sumartono Jochanan, yang sebelumnya menjabat Sespusinafis Bareskrim Mabes Polri. Singkat kata saat ini pengawasan internal Polri masih sangat lemah.

## ANALISA DATA MEDIA

Dalam analisa jaringan Kriminal, data korban *human trafficking* tergolong dalam kategori populasi tersembunyi (*hidden population*). Sejumlah metode telah ditempuh untuk menghitung berapa jumlah korban trafficking, seperti yang dilakukan ILO dengan metode

---

<sup>1</sup> <https://www.change.org/p/niat-bongkar-penyelundupan-tkw-malah-dipecat-dukung-brigpol-rudy-soik-melawan-trafficking-di-ntt>

*capture recapture, maupun metode lain yang ditawarkan oleh Global Slavery Index.* Berdasarkan berita tiga surat kabar lokal di NTT, IRGSC melakukan analisa data berdasarkan definisi human trafficking berdasarkan *Palermo Protocol* (Artikel 3) yang berbunyi:

*'Trafficking in person shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt persons, by means of the threat or use of force or other form of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments benefits to achieve the consent of a person having control over another person for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other form of sexual exploitation.'*<sup>2</sup>

Berdasarkan definisi ini, maka di Bulan September 2014 korban *trafficking* asal NTT sebanyak: 320 orang, dari total 326 orang pelaku migrasi. Lebih jauh lagi sebanyak 22 orang adalah anak-anak dan buta huruf, dan 1 orang anak terbukti menjadi korban *sex trafficking* antar pulau di NTT dengan kedok karaoke di Maumere (Kabupaten Sikka). Dari jumlah ini 214 orang dikirim menggunakan PPTKIS yang sudah ditutup Menakertrans tahun 2013, tetapi masih beroperasi dengan leluasa. Sebanyak 96% pelaku trafficking yang tercatat dari populasi migrasi bermasalah dilakukan oleh PPTKIS, dan sisanya dilakukan oleh orang per orang. Dari asal daerah dari korban yang teridentifikasi tiga kabupaten pecahan Kabupaten Sumba Barat masing-masing Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah, dan Kabupaten Sumba Barat menjadi surga *trafficking* sebanyak 86%.

Tingginya angka *trafficking* dari pecahan Kabupaten Sumba Barat sangat terkait mudahnya pembuatan dokumen aspal (asli tapi palsu) di ketiga kabupaten ini. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di masing-masing kabupaten merupakan instansi yang perlu diusut. Bukti pemalsuan sejenis sudah ditemukan di tahun 2004.<sup>3</sup>

## PELANGGARAN TERTINGGI

Berdasarkan berita suratkabar, pelanggaran tertinggi yang tergolong dalam perdagangan orang:

- Pemalsuan Identitas

<sup>2</sup> UN General Assembly, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, 15 November 2000 (Trafficking Protocol), Article 3 (a)

<sup>3</sup> [https://www.youtube.com/watch?v=3N8JIOu\\_okc](https://www.youtube.com/watch?v=3N8JIOu_okc)

- Tempat penampungan yang tidak layak baik di kantor cabang (di NTT) maupun BLK (Jawa Barat, Jawa Tengah)
- Selama menunggu pemberangkatan para korban di-isolasi
- Lokasi padat penghuni, dan tidak diberi makan yang layak
- Tidak memiliki kontrak kerja (yang mengatur hak dan kewajiban tenaga kerja yang direkrut)
- Anak-anak maupun tenaga kerja yang buta huruf juga direkrut

### POSISI MEDIA TERHADAP *TRAFFICKING*

Posisi jurnalis/wartawan tidak selamanya menjadi *watch dog* untuk kepentingan warga negara, sebaliknya dalam analisis berita ini ditemukan dalam berita yang menjadi polemik, wartawan tidak obyektif. Kondisi ini dapat dipengaruhi beberapa hal:

(1) ketidakpahaman jurnalis terhadap protocol human trafficking

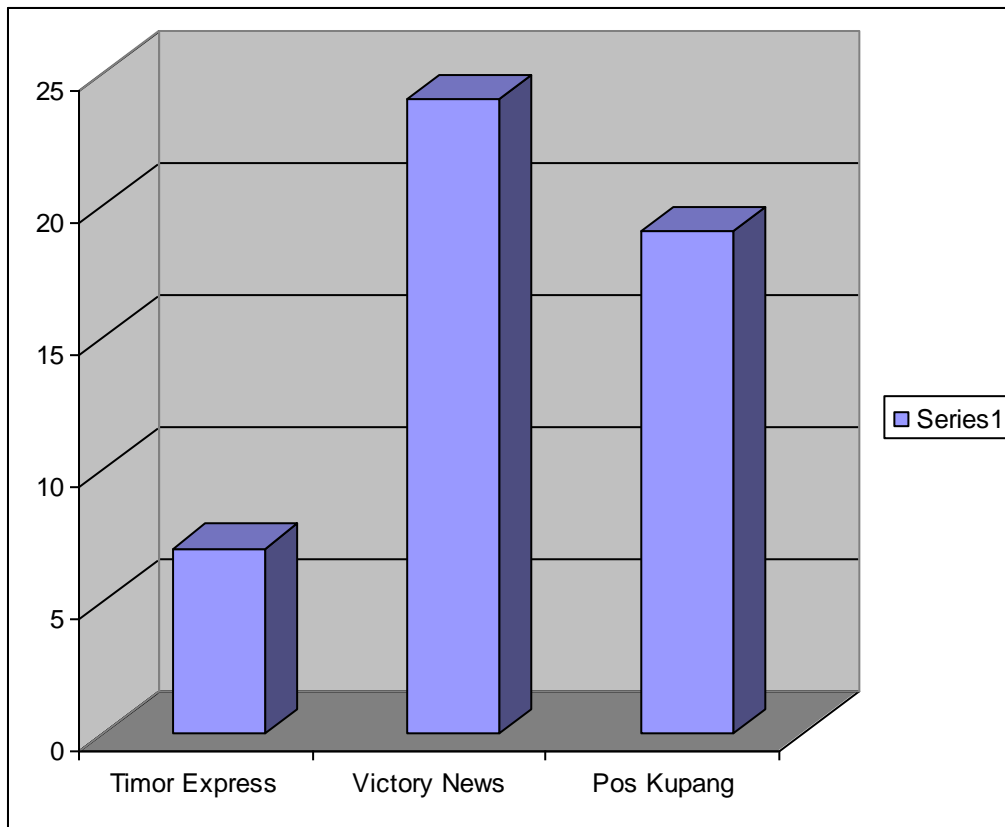
(2) kedekatan dengan narasumber

(3) ketiadaan empati terhadap para korban yang pada umumnya tidak pernah diwawancarai

(4) minimnya *skill* investigasi. Kemampuan meliput khususnya dalam berita yang menjadi polemik seharusnya wartawan memiliki panduan tersendiri, tidak hanya merekam pernyataan, tetapi mengumpulkan fakta sebagai standar berita.

Porsi pemberitaan masing-masing media terkait kasus perdagangan orang bisa lihat di Tabel 1. *Victory News* ada di posisi pertama (24 berita), *Pos Kupang* (19 berita), dan *Timor Express* (7 berita). Dalam





**Tabel 1 Prosentase Berita Surat kabar**

## DAFTAR PERUSAHAAN YANG PERLU DIAWASI

Berikut ini daftar perusahaan yang perlu diawasi (Nama perusahaan, kota-kota/daerah tempat beroperasi dan No.Berita) berdasarkan olah data Bulan September 2014:

1. PT Graha Indrawahana Perkasa (i) (No.1 & No.5)<sup>4</sup>

<sup>4</sup> <http://berita.suamerdeka.com/smcetak/penyalur-tkw-terindikasi-dagangkan-orang/>

- a. Profil perusahaan:
    - i. Berdasarkan data BNP2TKI PT.Graha Indrawahana Perkasa didirikan tahun 2006, berdasarkan SK Menteri KEP.605/MEN/2006. Dalam alamat di SK Menteri, alamat yang tertera: Jl. Bambu I No.15C, Medan (Namun dalam penelusuran *on line*, maupun berita surat kabar, saat ini aktivitas terbanyak berada di Semarang, Jawa Tengah.)
    - ii. Target pengiriman: Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan Brunei Darussalam.
  - b. Korban: 11 orang
  - c. Lokasi pelanggaran: Kota Kupang
  - d. Pelanggaran: Para korban disekap 2-3 bulan tanpa ada kepastian dalam ruangan 4x6 M<sup>2</sup>. Para korban dibantu oleh para suster SSPS.
  - e. Modus kriminalitas: Berkas asli tidak dimiliki oleh para pekerja, semuanya dibuatkan oleh perusahaan.
  - f. Asal perekrutan: Kab. Sumba Barat Daya, Sumba Barat dan Sumba Tengah
2. PT Graha Indrawahana Perkasa (ii) (No.2)
    - a. Profil Perusahaan: Sama dengan di atas
    - b. Korban : Puluhan (Berita ini diambil dari Kantor Berita Antara, dan tidak dapat diverifikasi jumlahnya, sudah dilakukan penelusuran *on line* tapi angka yang disebut tetap puluhan sehingga dalam analisis diambil angka minimal 20)
    - c. Asal: Sumba
    - d. Lokasi: Jalan Sri Rejeki Nomor 20 Semarang, Jawa Tengah
    - e. Negara tujuan: Malaysia, Singapura, Taiwan dan Hongkong
    - f. Modus: Dikirim tanpa ada berkas resmi
    - g. Wilayah hukum: Polda Jawa Tengah
  3. PT Bukit Mayak Asri (No.2)
    - a. Profil Perusahaan:
      - i. Berdasarkan data BNP2TKI PT Bukit Mayak Asri didirikan pada tahun 2007, dengan SK Menteri KEP.25/MEN/I/2007
      - ii. Alamat: Jl. Lampiri Raya No.17 Pondok Kelapa Jakarta Timur
    - b. Korban: Tujuh dari 12 TKW asal Kabupaten Sumba Barat Daya melarikan diri.

- c. Modus: Ditampung selama sebulan tetap belum juga dikirim.
  - d. Pelaksana di NTTL Johanis Don Bosco/Yohanes Don Bosco. Berdasarkan penelusuran Johanis Don Bosco merupakan 'perekrut lama'. Ia sebelumnya menjalankan PT.Karya Semesta Perkasa (KSP) yang tidak lagi beroperasi. Pemilik PT.KSP adalah Fatkul Muin. Meskipun tertulis tidak beroperasi tetapi PT.KSP sendiri masih melakukan pengiriman (Lihat PT di urutan No.7)
  - e. Lokasi penampungan: Kelurahan Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang
  - f. Saran investigasi: Johanis Don Bosco atau Yohanes Don Bosco: PT.KSP sudah dilarang untuk beroperasi per 2013, tetapi hingga 2014 masih beroperasi. Kerja PT.KSP perlu dibuka lebih jauh.<sup>5</sup> Karena pada tanggal 4 September 2012, Johanis Don Bosco juga mengirimkan TKI sebanyak 11 orang melalui PT.KSP. Rute tahun 2012: Kupang—Jakarta---Batam---Malaysia
4. Perekrut Indipenden (No.3 dan No.4)
- a. Pelaku Yohana (37), warga Adonara, Kabupaten Flores Timur yang bekerja di Malaysia.
  - b. Modus : Pulang cuti kerja dari Malaysia dan dititipi orangtua. Para TKI hanya membawa KTP tanpa paspor, visa kerja, undangan bekerja dan jaminan kesehatan di negara tujuan.
  - c. Jumlah 10 orang, dan 1 orang (*re-entry*, perekrut)
  - d. Negara tujuan: Malaysia
  - e. Wilayah hukum: Polsek Adonara Timur, Kab.Flores Timur
5. PT. Total Data Persada
- a. Profil Perusahaan:
    - i. PT Total Data Persada didirikan dengan KEP.791/MEN/2006
    - ii. Alamat: Jl. Raya Jati Kramat No.8 Jati Makmur Bekasi
    - iii. Direktur utama: Robert SMK Silitonga
  - b. Pelanggaran:
    - i. Mengintimidasi petugas di Rumah Aman milik Dinas Sosial NTT

---

<sup>5</sup> [http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1953:lagi-11-tkw-ditangkap-di-bandara-el-tari&catid=151:info&Itemid=191](http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1953:lagi-11-tkw-ditangkap-di-bandara-el-tari&catid=151:info&Itemid=191)

- ii. Para TKI mengaku diperlakukan tidak manusiawi
- c. Pelaku: Kepala Cabang Salimon Gelang alias Morgan
- d. Korban: Total TKI ada 31 orang, 25 orang meminta pulang dan 6 orang memilih berangkat.
- e. Asal: Kab. Sumba Barat dan Sumba Tengah
- f. Wilayah hukum: Polda NTT. Pemeriksa Sub Direktorat (Subdit) 4 Renakta Unit 2 Trafficking, yakni Brigpol Djafar Alkatiri, Brigpol Taroci Nawa Gala, Brigpol Ekadia Akal, Brigpol Alham Mardian, Brigpol Yostan Lobang, Briptu Dolof Maka Ruku. Hadir pula Kasubdit 4 Renakta Unit 2 Trafficking Polda NTT, AKP Niko Darutama.
- g. Berita Koran: *Dua orang calon tenaga kerja Indonesia (TKI) pingsan menyaksikan pertengkaran antara staf PT Total Data Persada (TDP) Kupang dengan petugas Dinas Sosial NTT di Rumah Aman, Kupang, Selasa (16/9/2014) siang. Dia juga dijaga beberapa temannya. Mata keduanya tertutup dan suhu badan dingin. (No.11)*
- h. Prakondisi: Sebelumnya LSM Rumah Perempuan menjemput para korban yang diduga masih di bawah umur, dan diserahkan kepada Dinas Sosial. *Ditambahkan, dari pengakuan para TKW, mereka diperlakukan tidak manusiawi dan ada satu calon TKW mengaku masih dibawah umur dimana masih 16 tahun. "Kita bertindak bukan atas kemauan kami, tapi karena ada informasi sehingga pihaknya berkoordinasi dengan gugus tugas dan kepolisian, melakukan upaya penyelamatan." (No.13)*
- i. Tanggapan: Kepala Dinas Nakertrans Simon Tokan menyatakan tidak ditemukan kejanggalan. Sedangkan BP3TI Tato Tiran lebih fokus pada prosedur. (No.14)
- j. Analisa Media:
  - i. Dalam pemberitaan terkait pengerebekan PT.TDP secara implisit wartawan *Timor Express* lebih menyajikan apa yang dikatakan oleh Bos PT.TDP, Kadis Nakertrans, maupun BP3TI, tanpa melakukan investigasi mendalam. *Timor Express* menulis: *Menjawab koran ini, soal dugaan calon TKW dibawah umur dan dugaan manipulasi data diri calon TKW, semua dugaan itu tidak terbukti, sebab dokumen dan identitas diri tidak ada anak dibawah umur. "Semua pihak diharapkan bisa bekerjasama kedepan, agar penanganan TKW bisa berjalan dengan baik" katanya. (No.13)*
  - ii. Konfirmasi ini di hari yang sama malah ditemukan oleh jurnalis *Pos Kupang*: *PT TDP diduga telah melakukan perdagangan manusia atau human trafficking karena ada salah satu calon TKI Yang berusia 16 tahun, tapi di palsukan umurnya menjadi 21 tahun. Hal ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan usia bekerja. Semula saat*

*ditanyai oleh Pos Kupang di rumah transit PT Total Data Persada (TDP) Kupang, LH mengaku berumur 21 Tahun. Namun ketika ditanya oleh pihak Dinas Nakertrans NTT, Kementerian Hukum dan HAM, serta Rumah Perempuan, LH akhirnya mengaku usianya 16 tahun.(No.20)*

- iii. memperlakukan 31 orang Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Sumba secara tidak manusiawi dan memalsukan identitasnya.*
  - iv. Menjawab koran ini, soal dugaan calon TKW dibawah umur dan dugaan manipulasi data diri calon TKW, semua dugaan itu tidak terbukti, sebab dokumen dan identitas diri tidak ada anak dibawah umur. "Semua pihak diharapkan bisa bekerjasama kedepan, agar penanganan TKW bisa berjalan dengan baik" katanya.*
  - v. Tanggapan APJATI yang dimuat Timor Express: "Mereka (Calon TKW) yang ada, direkrut secara resmi dan memiliki dokumen lengkap, bahkan ada rekomendasi dari Dinas Nakertrans Kabupaten Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya. Para TKW ini berasal dari Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya" ungkapnya sembari memperlihatkan dokumen yang dikantonginya Faby mengemukakan, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan anggota DPRD NTT, Mersy Piwung dan jaringan gugus tugas, patut diberi apresiasi. Tetapi tentunya dalam pelaksanaan di lapangan, perlu ada koordinasi dengan APJATI, karena setelah di-cross check, dokumen para TKW di perusahaan tersebut sangat lengkap. (No.21)*
6. Pelaku Independen Jalil alias Bregi (No.12)
- a. Pelaku: Jalil alias Bregi asal Kampung Nyamuk, Wangatoa, Lembata
  - b. Mucikari: Sumirah
  - c. Modus: Merekrut anak SMA (17) untuk menjadi pekerja seks (*sex trafficking*)
  - d. Lokasi rekrutmen: Lewoleba, Kab.Lembata
  - e. Lokasi tujuan: Maumere, Kab.Sikka
  - f. Wilayah hukum: Polresta Lembata dan Polresta Sikka
7. PT Karya Semesta Perkasa (KSP) (No 37 & 38)<sup>6</sup>
- a. Lokasi: Jl. Poncol Raya, RT 04/02, Cireundeu, Ciputata, Kota Tangerang Selatan, Jawa barat
  - b. Modus: ditenggarai melakukan praktek perdagangan manusia karena banyak calon TKI yang tidak memenuhi standar.
  - c. Pelanggaran:

---

<sup>6</sup> <http://www.kabar24.com/nasional/read/20140903/66/228732/bnp2tki-blk-karya-semesta-perkasa-terindikasi-perdagangkan-manusia>

- i. Dari 302 TKI, ditemukan 20 orang yang buta huruf dan masih di bawah umur.
  - ii. 80 persennya berasal dari NTT (Sekitar 240 orang).
- d. Temuan: PT KSP ini sejak tahun 2013 sudah ditetapkan bermasalah, dan tidak boleh beroperasi, tetapi ternyata masih beroperasi hingga tahun 2014.<sup>7</sup> Dasar hukum pencabutan PT.KSP adalah SK Menakertrans No.23/2013 tanggal 15 Februari 2013. Saat itu 12 PPTKIS yang dicabut izinnnya adalah PT Mangun Jaya Perkasa, PT Rosasena Prima Jaya, PT Karya Semesta Perkasa, PT Nurani Indah Perkasa, PT Awan Bina Insani, PT Interindo Mitra Sukses, PT Aula Graha, PT Data Putra Jaya, PT Prayogo Prajogo, PT Eka Putra Abadi, PT Solusi Sukses Mandiri, PT Ansfrida Family, PT Sinar Insansi Barokah, dan PT Sinergi Bina Karya. Entah bagaimana PT KSP tetap bisa hidup?

#### DAFTAR LEMBAGA PUBLIK YANG PERLU DIAWASI:

Berdasarkan berita Bulan September 2014, beberapa institusi yang perlu diawasi dalam kasus perdagangan orang antara lain:

1. Dinas Nakertrans Provinsi NTT
2. Dinas Nakertrans Kab.Sumba Barat Daya
3. Dinas Nakertrans Kab.Sumba Barat
4. Dinas Nakertrans Kab.Sumba Tengah
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Sumba Barat Daya
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Sumba Barat
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumba Tengah
8. Polda NTT (Reskrimum dan Reskrimsus)
9. BP3TI Provinsi NTT
10. APJATI Provinsi NTT

---

<sup>7</sup> <http://www.beritasatu.com/nusantara/105030-pelaksana-penempatan-tki-swasta-yang-sudah-dicabut-izinnnya-tak-diberi-izin-lagi.html>

## DAFTAR SINGKATAN

AKBP	: Ajun Komisaris Besar Polisi
ALDIRAS	: Aliansi Keadilan dan Kebenaran Anti Kekerasan
Ampera	: Aliansi Melawan Perdagangan Orang
BARESKRIM	: Badan Reserse dan Kriminal
BLK	: Balai Latihan Kerja
BMI	: Buruh Migran Indonesia
BRIGPOL	: Brigadir Polisi
CTKW	: Calon Tenaga Kerja Wanita
DIRKRIMSUS	: Direktur Reserse Kriminal Khusus
DIRKRIMUM	: Direktur Reserse dan Kriminal Umum
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
GIP	: Graha Indrawahana Perkasa
GMNI	: Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
IRJEN	: Insperktur Jenderal
IRWASDA	: Inspektorat Pengawas Polda
KOMBESPOL	: Komisaris Besar Polisi
KOMNAS HAM	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KOMPOLNAS	: Komisi Polisi Nasional
KTKLN	: Kartu Tanda Kerja Luar Negeri
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
MABES POLRI	: Markas Besar Polisi Republik Indonesia
MAPOLDA NTT	: Markas Polisi Daerah Nusa Tenggara Timur
MMP	: Mandiri Mitra Perkasa
PANSUS	: Panitia Khusus
PERADI	: Perhimpunan Advokad Indonesia
PJTKIS	: Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta
POKJA MPM	: Kelompok Kerja Menentang Perdagangan Manusia
POLDA NTT	: Polisi Daerah Nusa Tenggara Timur
POLRES	: Polisi Resort

PROPAM	: Provesi dan Pengamanan
PT	: Perusahaan Terbatas
PUSAM	: Pusat Kajian Dan Advokasi Masyarakat
SIP	: Surat Izin Pengerah
TDP	: Total Data Persada
TKW	: Tenaga Kerja Wanita
WADIRTIPIIDUM	: Wakil Direktur Tindak Pidana Umum



## RINGKASAN BERITA MEDIA CETAK

No	Tanggal	Judul	Ringkasan
1	SELASA, 30 SEPTEMBER 2014	AMPERA TEMUI DPRD NTT (VN, HAL.2)	<p>Aliansi Melawan Perdagangan Orang (Ampera) menemui DPRD NTT dan meminta supaya DPRD mendesak Pemerintah Provinsi NTT agar segera memulangkan sedikitnya <b>11 TKI</b> yang ditelantarkan di tempat penampungan Cabang Kupang <b>PT Graha Indrawahana Perkasa (GIP)</b>. Pemulangan harus segera dilakukan, karena kondisi 11 TKI sangat memprihatinkan. Ada yang sakit dan mengalami tekanan psikis, karena disekap dalam ruangan berukuran 4x6 meter. Sementara itu, PT GIP tidak menghiraukan nasib 11 TKI tersebut. Demikian diungkapkan juru bicara Ampera Gregorius R Daeng dalam audiens bersama Fraksi Golkar DPRD NTT yang berlangsung di ruang rapat Fraksi Golkar, Senin (29/9).</p> <p>Gregorius mengatakan, selama ini perusahaan-perusahaan jasa tenaga kerja tidak mempunyai balai penampungan dan pelatihan. Para tenaga kerja itu dititipkan di rumah yang disediakan untuk menunggu waktu keberangkatan. “Bukan Balai Latihan Kerja (BLK). Mereka (TKI) disekap dalam ruang kecil. Akibatnya sakit dan tertekan. Sehingga dipindahkan ke keluarga-keluarga dan lainnya dirawat oleh suster-suster SSPS,” kata Gregorius. Dijelaskannya, 11 TKI itu berasal dari Kabupaten Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya. Para tenaga kerja yang direkrut PT GIP itu dititipkan di sebuah rumah, yang beralamat dekat CV Guntur, Kecamatan Oebobo Kupang. Hingga saat ini, mereka belum diberangkatkan. Padahal, 11 TKI itu sudah berada di Kupang sejak dua sampai tiga bulan lalu. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jaringan Relawan Untuk Kemanusiaan (J-Ruk) Ronaldus A Dadut menegaskan, pemerintah sesegera mungkin memulangkan 11 TKI yang ditelantarkan PT GIP tersebut. Ini dilakukan untuk menyelamatkan nasib para TKI yang berasal dari Pulau Sumba tersebut. Menurut Ronaldus, proses rekrutmen dan pengiriman tenaga kerja sebaiknya dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dapat memudahkan pengawasan dan pengendalian, serta menghindari masalah-masalah yang mengorbankan harkat dan martabat manusia. Pada kesempatan audiens tersebut, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD NTT Hugo Rehi Kalembu yang didampingi beberapa anggota fraksi di antaranya Gabriel Manek, Thomas Tiba, Ansgorius Takalapeta, Eldat Nenabu, dan Maximilianus Adipati Pari mengatakan, masalah</p>

			TKI NTT sudah sangat kronis. Dengan demikian, pihaknya akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyikapi persoalan TKI dalam rangka penyelesaiannya. Pansus itu, akan dibentuk setelah semua alat kelengkapan Dewan dipenuhi. Menurutnya, Pansus itu tidak bermaksud untuk mencari kesalahan, tetapi bisa menemukan titik-titik krusial yang memungkinkan masalah TKI tidak selesai. Selanjutnya, Hugo mengimbau agar semua pihak, baik lembaga pemerintah maupun swasta turut mengambil bagian dalam penyelesaian masalah TKI di NTT.
2		CALON TKI ASAL SUMBA KABUR DARI PENAMPUNGAN (VN, HAL.9)	<p>Puluhan calon tenaga kerja Indonesia yang tinggal di asrama penampungan balai latihan kerja <b>PT Graha Indrawahana Perkasa</b> di Jalan Sri Rejeki Nomor 20 Semarang, kabur setelah kecewa akibat tidak kunjung diberangkatkan ke luar negeri. Para calon TKI yang memutuskan untuk meminta pertolongan ke Polsek Semarang Barat, Minggu (28/9) tersebut berasal dari Nusa Tenggara Timur. Salah seorang calon TKI yang melarikan diri Irmayati Ngongo, mengaku, sudah cukup lama tinggal di penampungan, namun tidak kunjung diberangkatkan. “Kami berangkat dari Sumba ke Kupang pada 15 Juni lalu. Kami berada di Kupang sekitar satu bulan baru diterbangkan ke Semarang,” ungkapnya. Para calon tenaga kerja ini sudah berada di Semarang selama dua bulan, namun tidak juga diberangkatkan ke luar negeri. Pengakuan serupa disampaikan calon tenaga kerja lainnya, Lucia Bauka Meti.</p> <p>Menurut warga Biluwaw, Kecamatan Katiku Tanah, Kabupaten Sumba Tengah itu, para tenaga kerja ini direkrut oleh <b>Direktur PT Graha Indrawahana Perkasa, Sutadi Lie</b>. “Direkrut di Sumba, tidak pernah diminta mengumpulkan atau menyerahkan berkas,” ucapnya. Terpisah, Kapolsek Semarang Barat Ajun Komisaris Padli membenarkan kaburnya puluhan calon TKI tersebut. “Kami masih periksa apakah ada dugaan pelanggaran pidananya,” katanya. Adapun untuk dugaan pemalsuan dokumen, lanjut dia, merupakan domain Kepolisian NTT, sehingga pihaknya tidak bisa menanganinya.</p> <p>Sebelumnya, tujuh dari 12 TKW asal Kabupaten Sumba Barat Daya yang sudah sebulan ditampung di PT Bukit Mayak Asri, milik Johanis Donbosco di Kelurahan Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang juga melarikan diri dari penampungannya. Para TKW yang kemudian dikenal Marita Duryati Kadi Bili, Martha Bili, Supriati Ningsi</p>

			Muriuma, Martha Lende, Yohana Dimu, Agnes Juwita, dan Debiana Dadagole itu kabur karena sudah sebulan ditampung tetapi tidak lantas dikirim. Sebanyak 11 orang calon TKW ilegal asal Sumba juga berhasil diamankan polisi dari Mapolres Kupang Kota Kamis (25/9) sekitar pukul 24.00 Wita. Para TKW yang diamankan melalui penggerebekan di PT Graha Indra Wahana Perkasa di Kelurahan Oebobo, Kota Kupang itu, kini sudah dikembalikan kepada keluarga untuk dipulangkan ke kampung asalnya.
3		YOHANA DIKENAKAN WAJIB LAPOR (PK, HAL.10)	<b>Yohana (37), warga Adonara</b> , Kabupaten Flores Timur yang pulang cuti dari Malaysia diduga menjadi calon TKI dan TKW di Pulau Adonara. Dia kini dikenakan wajib lapor. Ia membawa 10 orang TKI hendak ke Malaysia, namun digagalkan Kepolisian Sektor (Polsek) Adonara Timur. "Yohana kami kenakan wajib lapor karena ia kami duga hendak membawa 10 orang TKW/TKI ke luar dari Adonara dengan tujuan Malaysia. Saat ini kami sedang mengumpulkan bukti dan meminta keterangan saksi," kata Kapolres Flotim, AKBP Dewa Putu Gede Artha, SH saat dihubungi, Senin (29/9/2014). Diakui Artha, dari hasil pemeriksaan sementara, Yohana mengaku sedang cuti pulang kampung. Dan, saat pulang ia dititip orangtua para TKI/TKW ke Malaysia untuk cari kerja jadi bukan menjadi calo. "Ini pengakuan Yohana, kami sedang dalam. Kami juga sudah minta keterangan orang tua dari para TKW/TKI yang hendak ke Malaysia. Kami juga tidak menahan Yohana, namun surat-suratnya kami tahan," kata Artha. Diberitakan sebelumnya, Jumat (26/9/2014) Kepolisian Sektor (Polsek) Adonara Timur membatalkan 11 TKI ilegal yang hendak ke Malaysia.
4	SENIN, 29 SEPTEMBER 2014	SEBELAS TKI ILEGAL DIGAGALKAN (PK, HAL.10)	Polsek Adonara Timur menggagalkan 11 orang TKI ilegal, Jumat (26/9/2014), yang akan dikirim ke Malaysia. Kapolres Flores Timur (Flotim), AKBP Dewa Putu Gede Artha, SH yang dihubungi per-telepon Sabtu (27/9/2014), mengatakan, 11 TKI itu sudah diamankan di Mapolres Flotim untuk diambil keterangan. Ke-11 TKI itu, yakni Yohana Kibi (45) warga Honihama yang diduga calo, Winie Florida (21) warga Honihama, Edeltrudis Benga (19) Honihama, Natalia Ose (26) warga Honihama, Nalita Nasiria (25), warga Honihama, Hironima Kewa (39) warga Mewet, Adonara Barat, Marselinus Masan (37), warga Mewet, Rofin Payon (32) warga Mewet, Fasilitas Surat (18), warga Mewet, Katarina Abon (32) warga Knotan, dan Martina Peni (38) warga Lite. "Para TKI/TKW ilegal itu digagalkan anggota Polsek Adonara Timur di Pelabuhan Waiwerang. <b>Mereka hendak menyeberang ke Larantuka dan selanjutnya dengan kapal ke Jakarta menuju Malaysia,</b> " kata Gede

			Artha yang saat dihubungi didampingi Kapolsek Adonara Timur, Ipda Petrus Bumi Kian. Warga Flotim, kata Artha, cenderung masuk bekerja ke negeri tetangga meski tanpa persyaratan resmi. Padahal mereka sadar bahwa untuk berangkat ke Malaysia harus dilengkapi dengan administrasi. "Bukan hanya uang untuk sewa kapal tapi bagaimana keselamatan para TKI dan TKW dalam perjalanan hingga ke tempat kerja," terangnya. Ia mengakui, para TKI dan TKW usai digagalkan di Polsek Adonara Timur dan diperiksa, selanjutnya dibawa ke Larantuka untuk pemeriksaan lanjutan di Mapolres Flotim. Menurutnya, saat diperiksa di Mapolsek dan Mapolres Flotim ditemukan para TKI hanya membawa persyaratan kartu tanda penduduk (KTP) tanpa paspor, visa kerja, termasuk Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN), undangan bekerja dan jaminan kesehatan di negara tujuan.
5	SABTU, 27 SEPTEMBER 2014	11 ORANG TKW ILEGAL ASAL SUMBA DIAMANKAN (VN, HAL.9)	Sebanyak 11 orang calon TKW ilegal berhasil diamankan polisi dari Mapolres Kupang Kota, Kamis (25/9) sekitar pukul 24.00 Wita. Para TKW yang diamankan melalui penggerebekan di PT Graha Indra Wahana Perkasa di Kelurahan Oebobo, Kota Kupang itu, kini sudah dikembalikan kepada keluarga untuk dipulangkan ke kampung asalnya. Sesuai hasil penyelidikan polisi, ke-11 calon TKW itu diketahui bernama Marlince Kadi (28) asal Sumba Barat Daya (SBD), Marta Magidiala (39) asal Sumba Barat, Debiana Dada (32) asal SBD, Debora Poro (27) asal Sumba Barat, Ernilala (27) asal Sumba Barat, Yohana Sulki Milla (29) asal SBD, Yuliana Lende (36) asal SBD, Ermiyati Daido Sairo (36) asal SBD, Ribka Belamali (34) asal SBD, Maria Tamo Ina (35) asal SBD, dan Katarina Podu Loya (30) asal Sumba Timur. Sesuai hasil penyelidikan yang dihimpun VN dari pihak kepolisian, para TKW itu tidak memiliki dokumen yang lengkap. Kepada polisi, para TKW mengaku, semua dokumen diurus oleh pihak perusahaan. <u>"Kami hanya jalan saja, semuanya (dokumen) diurus oleh pihak perusahaan. Sebagian dari kami juga sudah ditampung oleh perusahaan hampir lima bulan tetapi belum dikirim," ujar salah satu TKW yang enqgan disebutkan namanya itu.</u> Dia menambahkan, mereka yang melakukan pengaduan kepada pihak Nakertrans terkait kondisi mereka yang tidak diperhatikan pihak perusahaan. Selain itu, mereka tidak mendapat pelatihan apa pun selama berbulan-bulan ditampung perusahaan itu. <b>Kepala Dinas Nakertrans NTT Simon Tokan</b> mengatakan, saat ini pihak perusahaan tersebut sedang melengkapi berkas para calon TKW tetapi sebelum tuntas, sudah digerebek oleh polisi.

6	SENIN, 22 SEPTEMBER 2014	CEGAH TKI MANFAATKAN POTENSI DAERAH (VN, HAL.3)	<p>Untuk mencegah tenaga kerja di Kabupaten Kupang ke luar negeri maupun ke luar daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kupang akan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan berbagai potensi yang ada di wilayah tersebut supaya digarap oleh masyarakat. Penegasan itu dikemukakan Bupati Kupang Ayub Titu Eki pada acara Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Migrasi Aman, yang dilaksanakan di aula Kantor Bupati, Oelamasi, akhir pekan kemarin. Menurut Bupati Titu Eki, secara teori orang bekerja ke luar negeri adalah orang-orang yang memiliki keterampilan dan pengetahuan. Namun, faktanya tidak demikian. Menurut Bupati Titu Eki, Buruh Migran Indonesia (BMI) sering mendapat perlakuan secara tidak wajar, bukan karena kurang penyiapan diri dari sini, tetapi karena mafia tenaga kerja. Persoalan tenaga kerja ilegal bukan hanya kemauan tenaga kerja itu sendiri, tetapi juga kemauan majikan yang ada di sana. Sebab ada keuntungan tertentu bagi majikan yang memiliki tenaga kerja ilegal. Dia menegaskan, Pemkab Kupang akan menyiapkan regulasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai BMI. Dalam sosialisasi bukan hanya hal baik yang disosialisasikan tetapi kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi jika menjadi BMI.</p>
7	MINGGU ,21 SEPTEMBER 2014	HARKAT MANUSIA TAK SEPERTI BARANG JUALAN (TE, HAL 1 & 5)	<p>Praktek perdagangan manusia alias <i>Human Trafficking</i> di Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah seperti penyakit yang sulit di berants. Semakin banyak yang di persoalkan, semakin banyak yang di rekrut dan dikirim. Dan korbanya selalu mereka yang belum mengerti at paham mengenai kerja, mafia perdagangan orang ini. Dan kebanyakan adalah kaum perempuan, bahaka tak sedikit yang dibawah umur. Para korban ini selalu diimingi gaji yang 'wah' ketika menjadi TKI/TKW, lalu mereka lupa akan masa depan mereka yang 'belum jelas' itu termasuk dengan taruhan nyawa. Berkali-kali para aktivis/pemerhati <i>Human Trafficking</i>, tokoh/lembaga agama, tokoh masyarakat juga elemen terkait lainnya bersuara, tetapi seakan suara ini masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Tidak sedikit diantara korban perdagangan manusia ini khususnya yang berasal dari NTT menjadi korban. Mereka pergi dengan sehat walhafiat kembali sudah menjadi mayat. Dan kasus seperti ini tidak membuka mata kaum kita di NTT. Maklum akibat Kesenjangan ekonomi warga lebih senang mengais rejeki di luar negeri, tanpa dukungan keterampilan yang memadai. Semua menjadi lengkap ketika para calo yang ada adalah orang di sekeling rekrutan ini ikut bermain dan melancarkan bujuk rayuan, mulai dari merekrut lapangan, mengantar di penampungan dan perusahaan yang mengirim atau menerima.</p>

8		TANGKAL TRAFFICKING UBAH REGULASI (TE, HAL.1 & 5)	<b>Bendahara APJATI NTT, Fabi Banase</b> yang di hubungi koran ini, Sabtu (20/9) mengemukakan, pemerintah harus merevisi aturan, dimana setiap Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PJTKIS) sebelum membuka cabang harus menunjukkan Surat Izin Pengerah (SIP) TKI dan <i>job order</i> dari luar negeri. Pasalnya banyak perusahaan membuka cabang dan bergerak tanpa itu,. Lalu melakukan praktek perekrutan secara ilegal. Hal itu menyebabkan banyak TKI direkrut tanpa dokumen dan melalui jalur yang resmi. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, paparnya harus melihat hal itu, agar perekrutan dan pengiriman TKI secara ilegal bisa dihentikan. Bila hal itu tidak di lakukan, maka akan tetap ada, celah untuk oknum-oknum tertentu bermain dalam air keruh.
9	KAMIS, 18 SEPTEMBER 2014	SATGAS PENANGANAN TKI HARUS KONSISTEN (VN, HAL.2)	Satuan gugus tugas yang menjadi garda terdepan dalam penanganan <i>human trafficking</i> diminta untuk konsisten utuk melakukan tugas dalam mengawasi penempatan TKI. Selain itu menindak tegas perusahaan pengerah tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) yang beroperasi di wilayah NTT merupakan salah satu tugas serius yang harus di kerjakan dengan tanggungjawab moral kepada masyarakat NTT. Demikian benang merah pendapat anggota DPRD NTT Oswaldus dan Novianto Umbu Paty, Rabu (17/9). Oswaldus meminta agar satuan gugus tugas yang terdiri dari Biro Perempuan dan Anak, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta aparat penegak hukum harus tegas dalam melakukan pencegahan dan konsisten memberantas <i>trafficking</i> karena kondisi itu sangat merugikan masyarakat.
10		TERDAKWA MENANGIS DI PENGADILAN (PK, HAL.3)	<b>Rebeca Ledoh</b> terdakwa kasus penyekapan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Medan Sumatera Utara terus menangis ketika diperiksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1 A Kupang, Rabu (17/9/2014). Sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa ini dipimpin Ketua Majelis Hakim Parlas Nababan, SH, MH didampingi Ida Ayu N. Adnya Dewi, SH, MH dan Jamsir Simanjuntak, SH serta panitera pengganti, Melki Borel, SH bertindak sebagai JPU, Lala Siregar, SH, sementara terdakwa Rebecca Ledoh di damping penasehat hukumnya Ester Day, SH. Selama pemeriksaan terdakwa terus meneteskan air mata. Ketika ditanyai oleh Parlas Soal adanya bukti <u>uang Rp. 87.100.000 dari Mohar yang dikirim kepadanya, Rebeca mengatakan dana jutaan itu diberikan kepada orangtua para TKI sebagai uang sirih pinang.</u>
11	RABU, 17	DUA CALON TKI PINGSAN (PK,	Dua orang calon tenaga kerja Indonesia (TKI) pingsan menyaksikan pertengkaran antara staf PT Total Data Persada (TDP) Kupang dengan petugas Dinas Sosial NTT di Rumah

	<p>SEPTEMBER 2014</p>	<p>HAL.1 &amp; 7)</p>	<p>Aman, Kupang, Selasa (16/9/2014) siang. Pertengkaran yang nyaris adu jotos itu diduga karena kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Dua calon TKI yang pingsan itu berinisial RB dari Sumba Barat dan EDK dari Sumba Tengah. Hingga semalam Kepala Cabang <b>PT TDP Kupang, Salimon Gelang alias Morgan</b>, belum dapat dihubungi. Dua kali Pos Kupang menelepon ke telepon selulernya, Morgan tak menjawabnya. Begitupun melalui SMS, juga tidak dibalas. Pantauan Pos Kupang, Selasa (16/9/2014), pukul 15.15 Wita, RB terbaring lemas di kasur di salah satu kamar dan dikelilingi oleh beberapa temannya. Tangan dan kepala RB diurut. Kepalanya digosok bawang putih dan bawang merah. Sementara itu EDK terbaring di lantai ruang tamu. Dia juga dijaga beberapa temannya. Mata keduanya tertutup dan suhu badan dingin.</p>
<p>12</p>		<p>SISWI SMA DIJUAL Rp 300 RIBU (PK, HAL.9 &amp;15)</p>	<p>Melati (bukan nama sebenarnya), siswi salah satu SMA Negeri di Lewoleba, Kabupaten Lembata, dijual Rp 300 ribu kepada Sumirah, seorang mucikari di Maumere, Ibukota Kabupaten Sikka. Melati (17) kemudian dipekerjakan di salah satu tempat karaoke di Maumere untuk melayani pria hidung belang. Kasus <i>trafficking</i> itu sedang ditangani penyidik Polres Lembata. Sang mucikari telah dijebloskan ke sel Mapolres Lembata. Sementara <b>Jalil alias Bregi</b>, oknum pemuda yang menjual Melati kepada Sumirah, masih dalam pengejaran aparat keamanan. Informasi yang dihimpun Pos Kupang di Lewoleba, kasus <i>trafficking</i> itu terkuak ketika teman kosnya Melati di Lusikawak, menelepon orang tua Melati untuk mengabarkan bahwa Melati telah meninggalkan tempat kos tanpa kabar sejak 3 September 2014. Mendapat kabar tersebut, orang tua Melati langsung melacak keberadaan anak gadisnya di Lewoleba. Setelah menggali banyak informasi, akhirnya ditemukan bahwa terakhir kali Melati bepergian bersama seorang oknum pemuda bernama Jalil alias Bregi yang berdomisili di Kampung Nyamuk, Wangatoa. Saat itu juga keluarga korban mendatangi Bregi di kediamannya di Wangatoa, dan memberi ultimatum agar segera mengembalikan Melati. Bregi menyanggupi tuntutan itu, namun dengan syarat, orang tua korban harus menyerahkan uang Rp 800 ribu sebagai biaya untuk mencari Melati. Permintaan itu tidak dikabulkan orang tua Melati. Namun kepada Bregi, orang tua Melati meminta nomor Hp Sumirah, wanita yang disebut-sebut berada bersama Melati. Bregi pun menyerahkan nomor HP Sumirah, kemudian menghilang. Kasat Reskrim Polres Lembata, Iptu Abdul Rahman Aba, SH melalui Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Brigpol Mirani Mukhlis, membenarkan adanya</p>

			<p>kasus <i>trafficking</i> tersebut. Ia menyebutkan bahwa kasus tersebut sedang ditangani. Ditemui Pos Kupang di Mapolres Lembata, Selasa (16/9/2014) siang, Mirani mengungkapkan, kasus perdagangan orang itu terkuak ketika keluarga Melati menjebak Sumirah, sang mucikari yang mempekerjakan Melati sebagai pekerja seks di salah satu tempat karaoke di Maumere.</p>
13	SELASA, 16 SEPTEMBER 2014	TIDAK ADA BUKTI PENYEKAPAN (TE, HAL.9 & 10)	<p>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi NTT, sejauh ini tidak menemukan adanya kejanggalan yang dilakukan oleh PT. Total Data Persada. Perusahaan itu merupakan mitra pemerintah, dan resmi terdaftar. "Berdasarkan hasil penyelidikan, kami tidak ditemukan kejanggalan, baik pengekapan maupun juga anak dibawah umur. Kita sudah periksa semua, tapi tidak ada yang menyalahi aturan, karena setiap dokumen calon TKW ada, dan mendapat rekomendasi dari Disnakertrans Kabupaten asal, "Bilang Kadis Nakertrans NTT, Simon Tokan di ruang kerjanya, kemarin. Dikatakan, penampungan calon TKW, merupakan tempat konsolidasi, soal surat-surat dan lain. Karena itu, yang dilakukan PT. Total Data Persada, tidak masalah. Dia malah menduga oknum polisi dan LSM tertentu menculik para calon TKW, sebab kepala cabang berada di Jakarta dan staf tidak berada di tempat. Ditambahkan, calon TKW yang dititipkan Rumah Perlindungan Trauma Center, malah lebih buruk dari tempat penampungan, karena makan tidak benar maupun tidur. Disebutkan, PPTKIS berkontribusi untuk menciptakan peluang kerja dan peningkatan taraf hidup, karena itu jangan diobok-obok terus. Masih menurutnya, semua berkas lengkap dan kini masih menunggu kartu keluarga, dan semua masih dalam proses. "Tadi pagi saya sudah bertemu dan semua dokumen ada. Isu pengekapan tidak ada bukti, malah diduga penculikan karena anak-anak dibawa tanpa izin perusahaan. Ada kepentingan apa," ujarnya bertanya. Dia mengharapkan agar perusahaan-perusahaan tidak diperlakukan sepihak. "Kalau ada kejahatan harus dilaporkan ke polisi, bukan sebaliknya digrebek tanpa koordinasi dengan pihaknya selaku dinas teknis. Semua harus sesuai dengan aturan yang ada," paparnya. Menyoal kebijakan yang diambil berikutnya, Simon Tokan menjelaskan, pihaknya dipanggil semua pihak terkait untuk membahas hal ini. Jika tidak lengkap, maka pulangkan dulu, sedangkan yang lengkap dikirim ke negara tujuan kerja. Menjawab koran ini, soal dugaan calon TKW dibawah umur dan dugaan manipulasi data diri calon TKW, semua dugaan itu tidak terbukti, sebab dokumen dan identitas diri tidak ada anak dibawah umur. "Semua pihak diharapkan bisa bekerjasama</p>



			<p>kedepan, agar penanganan TKW bisa berjalan dengan baik" katanya.</p> <p>Terpisah, Direktur Rumah Perempuan Kupang, Libby Ratuarat-SinlaEloE kepada koran ini mengemukakan, pihaknya bersama gugus tugas lainnya, bertindak karena ada informasi kalau ada penyekapan dan juga anak dibawah umur turut direkrut menjadi calon TKW. Atas informasi itu, pihaknya langsung mengeluarkan para TKW di penampungan itu. Dan ternyata ada yang sakit dan tidak diperhatikan oleh perusahaan. Setelah melakukan perawatan, pihaknya kemudian menitipkan ke Rumah Perlindungan Trauma Center. Ditambahkan, dari pengakuan para TKW, mereka diperlakukan tidak manusiawi dan ada satu calon TKW mengaku masih dibawah umur dimana masih 16 tahun. "Kita bertindak bukan atas kemauan kami, tapi karena ada informasi sehingga pihaknya berkoordinasi dengan gugus tugas dan kepolisian, melakukan upaya penyelamatan."</p>
14		<p><b>BP3TKI: HARUSNYA LSM KOORDINASI SEBELUM GREBEK (TE, HAL.9 &amp; 10)</b></p>	<p>Sementara itu Kepala <b>BP3TKI NTT, Tato Tirang</b> yang dihubungi koran ini mengemukakan, dirinya sedang berada di Jakarta, dan sedang melihat TKW asal NTT di BLK PT. Data Total Persada. Dia mengemukakan, dirinya belum mengikuti betul masalah yang terjadi di Kupang. Namun dia menyesalkan sikap lembaga-lembaga yang mengeluarkan calon TKW dari penampungan perusahaan. Harusnya lembaga-lembaga termasuk LSM berkoordinasi sebelum melakukan penggrebekan. Calon TKW di penampungan katanya, masih bersifat sementara, dan nanti akan di <i>cross check</i> dokumennya. Jika tidak sesuai, pastinya akan dipulangkan. "BP3TKI nanti akan memeriksa semua dokumen calon TKW sebelum dikirim. Jika tidak lengkap dan sesuai prosedur, pastinya tidak akan diizinkan berangkat. karena itu, saya harapkan agar kedepan ada koordinasi lebih baik, sehingga tidak terjadi seperti hal ini" pungkasnya.</p>
15		<p><b>CABUT IZIN PERUSAHAAN BERMASALAH (PK, HAL.3)</b></p>	<p>Pemerintah bisa melakukan pencabutan izin dari perusahaan pengerah tenaga kerja bermasalah yang merekrut tenaga kerja dari wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Upaya ini merupakan langkah tindakan tegas yang dilakukan Pemerintah untuk menghentikan persoalan TKI. Hal ini di sampaikan Sekda NTT, Frans Salem Ketia di temui Pos Kupang, Senin (15/9/2014). Salem ini diminta tanggapan Pemerintah Provinsi NTT terkait kasus TKI yang selaku terjadi diwilayah NTT dan melibatkan tenaga-tenaga kerja di NTT. "Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Provinsi harus bertindak tegas apabila masalah TKI terjadi terus-menerus upaya tindak tegas yang ditempuh yakni mencabut izin perusahaan bermasalah yang merekrut atau perusahaan pengerah tenaga kerja," kata Salem.</p>

16		<p>“MAMI” MIRA          JADI TERSANGKA          (VN, HAL.14)</p>	<p>Jajaran Polres Lembata telah menetapkan seorang tersangka dalam kasus penjualan seorang siswi kelas 2 salah satu SMA di Kota Lembata yang dipekerjakan sebagai pelayan pria hidung belang di Kota Maumere. Demikian pengakuan Kapolres Lembata AKBP Wresni Haryadi Satya Nugroho melalui Kasat Reskrim Iptu Abdulrahman Aba Meang kepada wartawan di ruang kerjanya Senin (15/9). Dijelaskannya, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka adalah Mira, si perekrut. Sementara Bregi, yang tak lain adalah pelaku, hingga kini masih menjadi buronan polisi. “Kami sudah keluarkan surat penangkapan terhadap Bregi karena saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polres Lembata,” jelasnya. Ia menambahkan, para pelaku dikenakan pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Manusia dengan ancaman pidana penjara minimal tiga tahun dan denda Rp 120 juta dan ancaman maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp 600 juta. Sementara itu, korban (sebut saja Bunga) kepada wartawan mengaku, sebelum dirinya dibawa ke Maumere, ia disekap selama tiga hari oleh seseorang yang dikenalnya bernama Jali alias Bregi. Selama penyekapan, dirinya tidur sekamar dengan Bregi. Bahkan, ia sempat dijual kepada seseorang yang disebutnya bernama paman dengan harga Rp 100 ribu. Siswi kelas 2 di salah satu SMA di Kota Lewoleba itu membenarkan bahwa dirinya dibawa ke Kota Maumere dan dijadikan pelayan lelaki hidung belang di salah satu tempat hiburan malam. Selama seminggu dirinya sudah melayani lima orang tamu dan uang hasil kerjanya disimpan Mira (sang mami) yang kini sudah mendekam dalam tahanan Polres Lembata. Ayah Korban, SP, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang dengan caranya sendiri memberi dukungan kepada keluarga sejak upaya pengungkapan, penangkapan, penyelamatan korban, hingga penyerahan pelaku ke polisi. “Dari pengakuan Mira, keluarga mengantongi beberapa nama yang diduga terlibat dalam jaringan ini. Kami masih percaya kalau polisi mampu menangkap semua pelakunya,” ujarnya. Bongkar sindikat sementara itu, Aliansi Keadilan dan Kebenaran Anti Kekerasan (Aldiras) mendesak Polres Lembata membongkar sindikat <i>human trafficking</i>. Desakan tersebut disampaikan kepada wartawan di Mapolres Lembata, saat pelaku <i>trafficking</i> yang berhasil diringkus di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, diserahkan ke polisi.</p>
17	<p>SENIN, 15</p>	<p>GEREJA KECAM          PERDAGANGAN</p>	<p>Gereja dalam panggilan pelayanan di dunia tidak memisahkan diri dan perhatiannya dari persoalan-persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Kegembiraan dan</p>

	<p>SEPTEMBER 2014</p>	<p>MANUSIA (VN, HAL.3)</p>	<p>kecemasan manusia merupakan tanggung jawab gereja dalam langkah peradaban zaman. Berbagai persoalan sosial yang terjadi dan merebak saat ini disikapi secara aktif untuk mencegah dan menyelamatkan manusia dari tindakan-tindakan yang mengorbankan harkat dan martabatnya. Sebagai salah satu institusi sosial, gereja mengancam aksi perdagangan manusia yang terjadi, karena tindakan oknum-oknum yang tidak manusiawi. Demikian intisari pendapat yang disampaikan Rohaniwan Katolik Romo Leo Mali, Ketua Sinode GMIT Pdt Robert St Litelnoni, dan Ketua Komisi Perdamaian dan Keadilan Keuskupan Atambua Romo Paulus Nahak ketika dihubungi VN, akhir pekan kemarin terkait maraknya pengiriman tenaga kerja ilegal sebagai salah satu bentuk perdagangan manusia. Romo Leo Mali yang juga relawan Aliansi Melawan Perdagangan Orang (Ampera) mengatakan, pengiriman tenaga kerja ilegal memberi peluang bagi terjadinya eksploitasi manusia. Tenaga kerja ilegal akan dipasarkan sesuai penampilan, dan kemampuan dan lain-lain. "Ini berarti, manusia sama halnya dengan barang di pasaran. Apakah laku atau tidak di pasaran. Yang laku akan ditempatkan sesuai kemauan majikan untuk melakukan tindakan apa saja. Yang tidak laku, bisa dikembalikan," kata Romo Leo yang merasa kaget ketika mendengar informasi tentang salah satu tenaga kerja yang diloloskan tanpa berkas administrasi yang lengkap. Atas kondisi ini, kata Romo Leo, pihaknya tetap bekerja keras untuk memberantas masalah perdagangan manusia yang terjadi saat ini. "Kelompok kita berasal dari semua kalangan. Kita akan terus bekerja sampai sindikat kasus ini bisa terungkap" kata Romo Leo. Terpisah, Ketua Sinode GMIT Pdt Robert St Litelnoni menilai persoalan perdagangan manusia sudah sampai pada tahap meresahkan. Dengan demikian, pihaknya mengancam perbuatan yang mengorbankan harkat dan martabat manusia yang diduga melibatkan pengambil kebijakan, termasuk aparat keamanan. "Pasti ada oknum birokrasi dan aparat keamanan yang diduga turut melindungi. Sehingga, bisa terjadi. Kalau toh demikian sangat disesalkan," kata Pdt Robert. Dijelaskannya, untuk mencegah dan menyelamatkan tindakan-tindakan perdagangan manusia, pihaknya aktif melakukan pendekatan dengan jemaat untuk dibekali dengan informasi pengiriman tenaga kerja yang benar. GMIT juga melakukan pendataan warga di setiap klasis, baik yang meninggalkan kampung maupun yang ada di luar daerah. Bagi yang berada di luar daerah, lanjut Pdt Robert, akan diusut untuk diketahui tujuan keberadaannya. Hal senada ditegaskan, Romo Paulus Nahak. Ketua</p>
--	---------------------------	--------------------------------	---

			<p>Komisi Perdamaian dan Keadilan Keuskupan Atambua itu mengatakan, perdagangan manusia sangat berkaitan dengan alasan mengapa orang mencari kerja di luar daerah. Kondisi ini harus dilihat sebagai penyebabnya. Karena menjadi peluang terjadinya pengiriman tenaga kerja ilegal. Romo Paulus menghendaki agar persoalan ini dicermati secara komprehensif dan semua pihak diminta untuk berpartisipasi sesuai tugas dan tanggung jawab. “Itu dulu, saya melihat masalahnya. Kita harus cermati sama-sama untuk diselesaikan,” kata Romo Paulus. Menurut Romo Paulus, Gereja mengecam perbuatan dan tindakan perdagangan manusia saat ini. Karena, tindakan tersebut melawan harkat dan martabat manusia. Gereja dipanggil untuk memperjuangkan harapan dan kedamaian bagi umat yang mengalami penindasan akibat kekerasan dan perilaku ketidakadilan lainnya.</p>
18		<p>25 CALON TKI DIPERIKSA MARATON (PK, HAL.1 &amp; 7)</p>	<p>Sebanyak 25 orang Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) asal Sumba yang henggang karena tidak nyaman berada di Rumah Transit milik PT Total Data Persada (TDP) Kupang, Sabtu (13/9/2014), di periksa secara marathon selama Sembilan jam dari pukul 08.00-17.00 wita oleh enam penyidik Polda NTT. Hingga Sabtu pagi, calon TKI yang memilih henggang dari rumah transit PT TDP Kupang bertambah menjadi 25 orang dari sebelumnya 23 orang. Itu berarti, kini tersisa enam calon TKI yang masih ada di rumah transit PT TDP. Sebanyak 25 calon TKI yang memilih pulang kampung halamannya diperiksa oleh enam penyidik dari Sub Direktorat (Subdit) 4 Renakta Unit 2 Trafficking, yakni Brigpol Djafar Alkatiri, Brigpol Taroci Nawa Gala, Brigpol Ekadia Akal, Brigpol Alham Mardian, Brigpol Yostan Lobang, Briptu Dolof Maka Ruku. Hadir pula Kasubdit 4 Renakta Unit 2 Trafficking Polda NTT, AKP Niko Darutama.</p>
19		<p>DPRD MINTA POLISI SEGEL PT TDP (PK, HAL.1 &amp;7)</p>	<p>Aparat kepolisian harus segera memasang garis polisi menyegel kantor dan rumah penampungan calon tenaga kerja Indonesia (TKI) PT Total Data Persada (TDP) Kupang sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Pernyataan itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD NTT, Jimi Sianto, dihubungi Pos Kupang, Sabtu (13/9/2014). Dia dihubungi terkait tindakan PT TDP yang beralamat di <b>Jalan Bhakti Karang, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang</b>, memperlakukan 31 orang Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Sumba secara tidak manusiawi dan memalsukan identitasnya. Jimi mengatakan, kasus ini terungkap secara jelas dan semua pihak, baik pemerintah,</p>

			kepolisian dan anggota DPRD maupun aktivis yang langsung mengungkapnya. "Pemerintah dan aparat penegak hukum bisa langsung mengambil langkah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT harus segera mencabut izin operasional dari perusahaan tersebut. Perlakuan yang tidak manusiawi jelas melanggar hak asasi manusia sehingga pihak kepolisian saya minta supaya langsung pasang <i>police line</i> (garis polisi) di tempat penampungan. Pimpinan dan staf PT TDP harus ditahan untuk diambil keterangan dan diproses hukum lebih lanjut," tegas Jimi. Menurut dia, perlakuan tidak manusiawi dan pemalsuan identitas melanggar hukum karena itu pemerintah dan penegak hukum harus bekerja profesional mengusut dan jangan sampai meloloskan lagi para pelakunya.
20		HUMAN TRAFFICKING (PK, HAL.7)	PT TDP diduga telah melakukan perdagangan manusia atau <i>human trafficking</i> karena ada salah satu calon TKI Yang berusia 16 tahun, tapi di palsukan umurnya menjadi 21 tahun. Hal ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan usia bekerja. Semula saat ditanyai oleh Pos Kupang di rumah transit PT Total Data Persada (TDP) Kupang, LH mengaku berumur 21 Tahun. Namun ketika ditanya oleh pihak Dinas Nakertrans NTT, Kementerian Hukum dan HAM, serta Rumah Perempuan, LH akhirnya mengaku usianya 16 tahun. LH mengaku diminta petugas lapangan (PL) PT TDP di Sumba Barat untuk menaikkan umurnya menjadi 21 tahun. "Kalau calon TKI yang usianya masih belasan tahun yang direkrut PT TDP, maka PT TDP sudah melakukan perdagangan manusia atau <i>human trafficking</i> . Pasalnya anak di bawah umur belum bisa bertanggung jawab secara hukum meskipun ada dokumen TKI yang di tandatanganinya," kata Wati, dari Rumah Perempuan melalui Telepon selulernya Minggu (14/9/2014) Pagi.
21		PT. TOTAL DATA PERSADA DAN APJATI (TE, HAL.9 & 10)	Tak cuma itu, Asosiasi Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) NTT juga menyatakan kekecewaan mereka. Pasalnya, PT. Total Data Persada merupakan anggota APJATI NTT dan dalam merekrut telah melalui prosedur yang benar. Kepala Cabang PT. Total Data Persada, Sakirman Gelan menjelaskan, perusahaannya memiliki dokumen lengkap terkait perekrutan 35 calon TKW. Selain itu, perusahaan tersebut tercatat secara resmi di Kemenakertrans dan resmi menjadi anggota APJATI NTT. "Kita perusahaan resmi dan semua calon TKW yang kami rekrut semua memiliki dokumen yang lengkap" jelas Sakirman, saat ditemui di rumah singgah TKI, Dinas Sosial Provinsi NTT, di samping TMP Dharma Loka, Sabtu (13/9). Saat itu Sakirman bersama <b>Ketua Harian APJATI NTT, Jhon Salmon Siragih, Bendahara APJATI NTT, Faby Banase serta sejumlah aparat kepolisian</b>

			<p><b>dari Polda NTT yang mengamankan dan memantau proses pemeriksaan terhadap 25 TKW asal Sumba</b>, yang ditampung di rumah singgah tersebut. Sakirman menyatakan kalau seluruh TKW yang direkrut itu tidak bermasalah karena dilengkapi dokumen resmi. "Mereka (Calon TKW) yang ada, direkrut secara resmi dan memiliki dokumen lengkap, bahkan ada rekomendasi dari Dinas Nakertrans Kabupaten Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya. Para TKW ini berasal dari Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya" ungkapnya sembari memperlihatkan dokumen yang dikantonginya. Disebutkan, saat calon TKW dikeluarkan dari penampungan perusahaan tersebut, pihaknya sama sekali tidak mengetahui, karena dirinya sedang berada di Jakarta, dan tidak ada karyawan di sana. "Kami heran ketika kami tidak ada di tempat, ada grebek. Kami kantongki semua dokumen yang lengkap" tandasnya.</p> <p>Walau demikian, jelas Sakirman, pihaknya siap untuk menjalani pemeriksaan dari pihak terkait, karena didukung data yang valid. <b>Bendahara sekaligus Jubir APJATI NTT, Faby Banase</b> menilai pernyataan anggota DPRD NTT, Mersy Piwung menggambarkan kalau wakil rakyat tersebut tidak memahami soal aturan ketenagakerjaan. Pasalnya, pernyataan soal adanya pengekapan dan <i>trafficking</i> sebanyak 35 TKW oleh PT. Total Data Persada, terkait manipulasi dokumen sangatlah tidak benar. "Kami nilai Mersy Piwung tidak memahami aturan ketenagakerjaan. Pengekapan dan <i>trafficking</i> itu seperti apa," kata Faby di rumah singgah Dinsos Provinsi NTT itu.</p> <p>Faby mengemukakan, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan anggota DPRD NTT, Mersy Piwung dan jaringan gugus tugas, patut diberi apresiasi. Tetapi tentunya dalam pelaksanaan di lapangan, perlu ada koordinasi dengan APJATI, karena setelah di-<i>cross check</i>, dokumen para TKW di perusahaan tersebut sangat lengkap.</p>
<b>22</b>	MINGGU, 14 SEPTEMBER 2014	POLISI GREBEK 26 CALON TKI (PK, HAL.8)	<p>Warga Kelurahan Naikolan, Jumat (12/9/2014), digegerkan aksi penggerebekan satu kos di RT 07/RW 03, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, yang menampung 26 calon TKI. Dari 26 calon TKI itu, 13 orang asal Atambua, dan 13 orang lainnya dari Ayotupas, Timor Tengah Selatan (TTS), yang hendak dikirim ke Kalimantan Timur untuk bekerja di kebun kepala sawit. Tim Polres Kupang Kota yang mendapat informasi dari salah seorang warga Naikolan langsung menuju lokasi dan mendata sekaligus wawancara 26 calon TKI terkait asal dan daerah tujuan kerja mereka. Setelah didata, 26 calon TKI ini dibiarkan berangkat ke Kalimantan Timur menggunakan kapal</p>

			<p>laut. Ketua RW 03, Alfons Litelnoni, mengatakan, para calon TKI itu tiba di Naikolan pada Jumat (12/9/2014) dini hari, sekitar pukul 04:00 wita menggunakan bus. Mereka ini kenal dengan salah satu penghuni kos milik Pak Sem Safatu. Namun karena jumlah mereka banyak akhirnya mereka tidur separuh di jalan setapak. Karena mereka tidur di jalan setapak dan jumlah cukup banyak, warga resah dan menelepon polisi.</p>
23	SABTU, 13 SEPTEMBER 2014	POLISI DALAM KUBANGAN TRAFFICKING (VN, HAL.1)	<p>Pengaduan Brigpol Rudy Soik kepada Komnas HAM, Ombudsman RI, Mabes Polri, DPR RI, dan LPSK terkait borok institusinya, Polda NTT, dalam kasus <i>human trafficking</i>, sepertinya tidak membawa dampak apa-apa. Tiga kasus perdagangan manusia yang terjadi pada Jumat (12/9) kemarin, adalah buktinya. Ketiga kasus yang sama dan sebangun ini mendapat <i>treatment</i> yang berbeda oleh aparat kepolisian. Pertama, kasus 31 TKW disekap di rumah penampungan PT Total Data Persada di Kelurahan Fatululi. Penanganannya; para calon TKW diserahkan ke Dinas Sosial untuk kemudian dipulangkan ke daerah masing-masing. Kedua, kasus 20 calon TKI yang direkrut PT Prima Tunas Karisma dengan tujuan Kalimantan yang diamankan jajaran KP3 Laut di Pelabuhan Tenau. Penanganannya; para calon TKI diserahkan kepada Dinas Nakertrans untuk dipulangkan. Ketiga, kasus penggerebekan oleh warga RT 07/RW 03 Kelurahan Naikolan terhadap sebuah rumah penampungan 30 orang calon TKI yang direkrut PT Bhumi Simanggaris Indah. Penanganannya; para calon TKI tidak diserahkan ke Dinas Nakertrans tapi polisi yang menjemput justru memfasilitasi mereka ke Pelabuhan Tenau untuk diberangkatkan ke Kalimantan.</p>
24		POLISI LOLOSKAN 30 TKI ILEGAL (VN, HAL.1)	<p>Kasus <i>Human Trafficking</i> di Provinsi NTT yang melibatkan oknum anggota polisi seperti tak ada habisnya. Jumad (12/9) kemarin, polisi ditengarai ikut meloloskan pengiriman 30 orang TKI ke Kalimantan lewat Pelabuhan Tenau, Kupang. Kejadian bermula ketika Jumat siang, warga RT 07/RW 03 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah yang diduga digunakan untuk menampung para calon TKI ilegal tersebut. Ketika warga mendatangi rumah tersebut, ternyata dari 30 orang di dalam rumah, hanya 12 orang yang memiliki KTP sebagai warga TTS dan TTU. Mereka mengaku direkrut oleh PT Bhumi Simanggaris Indah dan hendak diberangkatkan ke Kalimantan Timur dengan KM Bukit Siguntang. “Ketika diminta surat dari Nakertrans mereka tidak punya,” kata JS, seorang saksi mata. Melihat gelagat yang mencurigakan, lanjut, warga lalu menghubungi Pos Polisi Sikumana agar para calon TKI</p>

			tersebut diserahkan kepada Polres Kupang Kota dan selanjutnya Dinas Nakertrans Provinsi. "Tapi polisi yang datang ke lokasi mengatakan bahwa sudah ada instruksi pimpinan untuk lepas mereka. seorang laki-laki kemudian mendatangkan tiga bemo lampu 2 untuk membawa para calon TKI ke Tenau,". Jelas JS.
25		SINDIKAT GANDENG OKNUM POLISI (VN, HAL.1)	Tiga kasus <i>human trafficking</i> yang terjadi di Kota Kupang dan disertai perbedaan perlakuan, menjadi bukti bahwa sindikat pengiriman calon TKI/TKW asal NTT melibatkan oknum polisi. Bahkan oknum polisi secara sadar dan terang-terangan bertindak sebagai pembela sekaligus mem- <i>back-up</i> proses pengiriman para TKI-tKW ke daerah tujuan. Demikian benang merah pendapat aktivis PIAR NTT Paul Sinlaeloe, Koordinator J-PIT Pdt, Merry Kolimon, dan peneliti IRGSC kepada VN, Jumat (12/9).
		IRWASDA POLDA PASRAH (VN, HAL.1)	Inspektorat Pengawas Polda (Irwasa) NTT masih menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan tim Irwasum dan Propam Mabes Polri terkait berbagai kasus yang mencuat di Polda NTT. "Kita tunggu saja seperti apa. Kita akan tunggu hasil pemeriksaan oleh tim Irwasum dan Propam Mabes Polri, serta Pusdokes Mabes, hasilnya kita tunggu saja seperti apa. Apakah ada temuan penyimpangan dalam pemeriksaan siswa atau tidak," ungkap Inspektur pengawas polda (irwasda) NTT Kombes John Efri, Jumat (12/9) terkait kehamilan yang dialami calon polwan asal NTT yang sedang mengikuti pendidikan di Bali. Sementara itu, terkait penanganan kasus Brigpol Rudy Soik yang melaporkan atasannya ke Mabes Polri, kata dia, sementara ditangani Tim Khusus Inspektorat Polda NTT. pemeriksaan terhadap pihak terkait sementara dijalankan, baik anggota yang menangani kasus 52 CTKW sesuai dilaporkan ada surat perintah dan pimpinan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda NTT Kombes Pol. Mochamad Slamet.
26	SELASA, 9 SEPTEMBER 2014	PERJUANGAN BRIGPOL RUDY SOIK MEMBUAHKAN HASIL (VN)	Perjuangan Brigpol Rudy Soik mengungkapkan dugaan mafia <i>human trafficking</i> bertopeng pengiriman TKI di Mapolda NTT akhirnya membuahkan hasil. Mabes Polri menyimpulkan bahwa penyidikan kasus <i>human trafficking</i> yang melibatkan PT Malindo Mitra Perkasa harus dilanjutkan meski sebelumnya dihentikan oleh Direskrimsus Polda NTT Kombes Pol Mochamad Slamet. Kesimpulan itu diambil Mabes Polri dalam gelar kasus tersebut di Mabes Polri pada 27 Agustus lalu. Gelar kasus itu dilakukan setelah Brigpol Rudy, penyidik kasus tersebut, melaporkan Kombes Pol Mochamad Slamet yang menghentikan penyidikan kasus tersebut tanpa alasan yang jelas.



<b>27</b>	SENIN, 8 SEPTEMBER 2014	AMPERA SIAPKAN GERAKAN SOLIDARITAS AKBAR (VN)	Dukungan elemen-elemen masyarakat terhadap Brigpol Rudy Soik (Penyidik Pada Direktorat Kriminal Khusus Polda NTT) terus bertambah. Setelah membuat petisi dengan menggalang 10 tanda tangan, kali ini puluhan elemen masyarakat NTT memperispakan aksi damai dengan melibatkan ribuan orang guna mendukung langkah Rudy Soik.
<b>28</b>	MINGGU, 7 SEPTEMBER 2014	PERTARUNGAN HATI NURANI DI POLDA NTT BRIGPOL VS KOMBES (VN)	Ketua KPK Abraham Samad dalam suatu kesempatan pernah mengatakan, masih banyak polisi di Indonesia yang masih jujur. Namun menurut para polisi tersebut, lingkungan kerja di kepolisian membuat mereka sulit untuk hidup jujur. Di depan Kapolri, Jendral Polisi Sutarman, Abraham Samad meminta agar Kapolri membersihkan institusinya dari kebiasaan setor menyetor dan tentu kebiasaan buruk lainnya. Awal Januari lalu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTT melakukan penyidikan terhadap 26 dari 52 calon TKI yang diamankan, karena tidak memiliki dokumen. Hasilnya ditemukan bukti tindak pidana perdagangan manusia oleh sebuah perusahaan penyalur tenaga kerja. Namun, ketika penyidik hendak menetapkan tersangka, datang perintah sepihak dari Direskrimsus Polda NTT Kombes Pol Mochamad Slamet agar kasus tersebut dihentikan. Perintah tersebut tanpa alasan dan pertimbangan hukum yang jelas. Brigadir Rudi Soik, salah seorang anggota tim penyidik, saat itu sebagai penyidik pembantu, tidak bisa menerima perintah penghentian penyelidikan komandan tanpa alasan. Dihadapan Direktur Tindak Pidana Umum, Wadirtipidum, Kasubditipidum, penyidik serta tim analisis Badan Reserse Dan Kriminal (Bareskrim) Polri. Akhirnya para pengambil keputusan di Bareskrim Polri memerintahkan kepada sang Kombes untuk membuka kembali penyidikan kasus yang sudah diperintahkan dirinya supaya dihentikan, tetapi dilawan oleh sang brigadir.
<b>29</b>		KADO BUAT TUAN KAPOLDA NTT (VN)	Kapolda NTT Brigjen Ketut Untung Yoga dimutasi menjadi Kasespimti Sespim Polri Lemdikpol. Jabatan yang ditinggalkan diisi Wakapolda Aceh Brigjen Endang Sunjaya. Informasi itu dikemukakan asisten SDM Polri Irjen Mustafa Hari Kuncoro, akhir Agustus lalu. "Jadi ini bukan pergantian karena kasus tertentu. Memang saatnya butuh penyegaran dan dianggap sudah saatnya ada yang mutasi dan rotasi," kata Irjen Mustafa menampik rumor negatif terkait pergantian kapolda.
<b>30</b>	SABTU, 6 SEPTEMBER	SOIK TIDAK DIKENAI TINDAKAN DISIPLIN (PK,	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI menemui Wakapolda NTT, Kombes (Pol) Monang Manulang. Kehadiran LPSK guna menyampaikan tugas perlindungan terhadap Brigpol Rudy Soik. Pantauan Pos Kupang, Jumat, (5/9/2014), LPSK didampingi

	2014	HAL.5)	Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu, SH turut hadir dalam pertemuan itu asisten divisi penerimaan permohonan, Betti Ita Omas serta 2 orang staf LPSK Pascalis dan Andreas. Mereka diterima Wakapolda Kombespol Monang Manulang dan sejumlah pejabat Polda NTT. Pertemuan secara tertutup berlangsung diruang rapat Kapolda yang berlangsung sejak pukul 09.00-11.30 Wita.
31		HARGAI NIAT BAIK BRIGPOL RUDY SOIK (VN, HAL.3)	Perbudakan di abad manusia modern ini terwujud dalam bentuk penjualan manusia yang oleh para mafia dikemas dengan cara pengerahan tenaga keraja. Karena itu upaya Brigpol Rudy Soik melawan penjualan manusia di NTT patut di hargai, bahkan perlu di berikan apresiasi positif dari semua pemangku kepentingan di NTT. Apalagi momentum perlawanan bertepatan dengan momentum pergantian Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) NTT. Sehingga bisa menjadi pintu masuk untuk melakukan pembenahan internal kepolisian di NTT dalam kaitan dengan penanganan penjualan manusia.
32		RUDI SOIK BEBAS SAKSI (VN, HAL.1)	Brigadir Polisi (Brigpol) Rudy Soik mantan Anggota Krimsisus Polda NTT yang melaporkan atasan ke Mabes Polri dipastikan tidak kena sanksi disiplin. Kepastian tersebut disampaikan Wakapolda NTT Kombes Pol Modang Manulang dalam pertemuan bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pusat ruang rapat Polda NTT, Jumat, (5/9). "Itu jaminan yang di sampaikan kepada kami," ungkap Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu, kepada VN, usai pertemuan tersebut.
33	JUMAT, 5 SEPTEMBER 2014	DEWAN BARU JANJI PERANGI HUMAN TRAFFICKING (VN, HAL.1)	DPRD NTT harus menebar janji diawal masa tugas. Setelah sebelumnya berjanji akan mengurangi frekuensi bimbingan teknis (bimtek) dan studi banding, kini mereka berjanji pula akan membentuk pansus untuk menelusuri kasus <i>human trafficking</i> (perdagangan manusia) bertopeng pengiriman tenaga kerja tetap marak di NTT. Janji tersebut disampaikan wakil ketua DPRD NTT Nelson Matara saat berdialog dengan aktifis GMNI Cabang Kupang yang menggelar aksi demo, Kamis (4/9/2014)
34		MABES POLRI: KASUS TKI BELUM BERHENTI (TE, HAL.1 &3)	Pihak Markas Besar Polri menegaskan kasus dugaan tindak pidana Penjualan manusia yang dilakukan PT Malindo Mitra Perkasa belum berakhir. Bahkan kasus yang sedang sempat mengheboakan publik, yakni penanganan 52 calon TKI illegal Oleh PT. MMP tersebut belum di hentikan secara total. Pasalnya kasus tersebut dialihkan ke kasus dugaan pidana yang sama yang di lakukan oleh PT. MMP dan sekarang dalam penyelidikan Polres Kupang Kota.
35		BERSIHKAN	Kasus demi kasus mulai terkuak ditubuh Polda NTT. Mulai dari dugaan penghentian

		OKNUM POLISI BERMASALAH (TE, HAL.3)	penyelidikan kasus TKI. Maupun dugaan mafia kasus yang terbongkar dalam beberapa hari terakhir, diyakini terhambat bahkan terhentinya kasus pembunuhan Paulus Usna'at dan Obaja Nakmofa. Sejumlah kasus yang ada baik tingkat Nasional maupun NTT, tentunya menjadi preseden buruk bagi Kepolisian itu sendiri, terlebih Kepolisian Daerah (Polda) NTT. Di mata masyarakat NTT dan Indonesia pada umumnya, akan menjadi negatif, bahkan akan hilang kepercayaan publik. Berbagai masalah yang mencuat ditubuh Polda NTT, hendaknya menjadi refleksi mendalam bagi semua jajaran, dalam menjalan dan fungsi kepolisian, yakni melindungi, mengayomi serta memberi kepastian dan perlindungan hukum. Polisi sebagai penegak hukum, hendak mulai membuka diri, untuk dikoreksi agar terhindar dari perilaku-perilaku menyimpang, sebagaimana yang terungkap walau belum tentu kebenarannya.
		KAPODA DIDESAK TINDAK PENGIRIM TKI (PK)	Kepolisian Daerah (Polda) NTT didesak menindak tegas para pelaku atau para pengirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal NTT. Pengiriman TKI asal NTT diduga melibatkan oknum Polisi. Demikian orasi yang diampaikan Koordinator Pidato Politik GMNI, Yopi saat berorasi didepan Mapolda NTT, Jalan Soeharto, Kamis, (4/9/2014).
36	KAMIS, 4 SEPTEMBER 2014	POLDA NTT HARUS TRANSPARAN (PK, HAL.3)	Perhimpunan Advokad Indonesia (Peradi) Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta Polda NTT menjelaskan secara transparan kepada publik penanganan kasus dugaan <i>human trafficking</i> yang dikirim melalui PT Malindo Mitra Perkasa (MMP). Selain itu, Polda NTT juga perlu menjelaskan persoalan yang dihadapi Brigpol Rudy Soik. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Peradi NTT, Lorens Mega Man, SH di Kupang, Rabu, (3/9/2014). Ia dimintai tanggapan soal kasus Rudy Soik dan penanganan 52 calon TKI di Polda NTT. "Masyarakat butuh kejelasan dan transparansi baik dari Rudy dan juga Polda NTT dalam hal ini atasannya. Diduga ada beda pendapat dalam penanganan antara Rudy dan atasannya sehingga berujung pada pengaduan ke Mabes Polri dan Komnas HAM RI, Kata Lorens.
37		PENAMPUNGAN TKI DIGEREBEK (PK, HAL.1 &7)	Dilokasi penampungan TKI ilegal PT Karya Semesta Perkasa di Jl. Poncol Raya, RT 04/02, Cireundeu, Ciputata, Kota Tangerang Selatan, kuat ditenggarai melakukan praktek perdagangan manusia karena banyak calon TKI yang tidak memenuhi standar. Dari 302 TKI, ditemukan 20 orang yang buta huruf dan masih di bawah umur. Dan, 80 persennya berasal dari NTT.
38		SEKAMAR TIDUR	Sejumlah calon TKI yang ditampung di lokasi penampungan ilegal di Jl. Poncol Raya, RT

		30 ORANG (PK, HAL.7)	04/02, Cireundeu, Ciputat, Kota Tangerang Selatan mengaku mendapatkan pelatihan dan perlakuan layak selama di sana. "Saya biasa setiap hari beraktivitas kayak biasa aja sih. Belajar bahasa, belajar memasak, dan sebagainya. Nggak dianiaya atau diapa-apain juga sih di sini," ujar Silva (23), calon TKI asal NTT. Menurut Silva, dia baru berada di penampungan itu selama tiga pekan. "Enak-enak aja sih mas di sini. Memang tidurnya rame-rame karena kami kan banyak di sini. Tidur sekamar bisa 30an orang. Tapi gak masalah kalau saya sih," kata Silva.
39		<i>Polda Hentikan Kasus "Penjualan Manusia" (PK, HAL 1&amp; 7)</i>	Demikian Kabid Humas Polda NTT, AKBP Okto Riwu yang di konfirmasi via telpon seluler, Rabu (3/9). Dia mengatakan keputusan menghentikan penanganan kasus tersebut diambil oleh penyidik setelah dalam gelar perkara yang di lakukan Polda NTT tidak ditemukan bukti awal yang cukup.
40	RABU, 3 SEPTEMBER 2014	JADIKAN HUMAN TRAFFICKING MUSUH BERSAMA (VN, HAL, 1)	Masalah Perdagangan Orang ( <i>Human Trafficking</i> ) bertopeng pengiriman tenaga kerja ke luar daerah dan keluar negeri sudah berlangsung lama. Demikian ditegaskan Rohaniawan Romo Leo Mali, Pr dan Pendeta Mery Kolimon kepada VN, Selasa (2/8). Keduanya diminta komentarnya menanggapi sifat Brigpol Rudy Soik yang melaporkan Direskrimsus Polda NTT Kombes Pol Mochammad Slamet ke Mabes Polri karena menghentikan pengusutan <i>human trafficking</i> tanpa alasan yang jelas. Keduanya meminta agar media massa terus mempublikasi masalah <i>human trafficking</i> ini agar menjadi musuh bersama yang terus diperangi. Apa yang dilakukan Brigpol Rudy Soik merupakan bagian dari perang melawan kejahatan serius ini.
41		KAPOLRI BUKA HASIL GELAR KASUS 52 TKI DI MABES POLRI (PK, HAL 1& 7)	Kelompok Kerja Menentang Perdagangan Manusia (Pokja MPM) yang mendampingi mantan penyidik Polda NTT, Brigadir Polisi (Brigpol) Rudy Soik, yang dikorbankan atasannya, mendesak Kapolri Jendral Sutarman membuka hasil gelar kasus 52 calon TKI asal NTT yang di lakukan di Mabes Polri, Rabu, (27/8/2014) lalu. Buka hasil gelar kasus 52 calon TKI itu terkait pembiaran penanganan perkara oleh Direktur Kriminal Khusus (Deskrimsus) Polda NTT sehinga menghentikan 26 dari 52 calon tenaga kerja (CTKI) ynga direkrut oleh PT Malindo Mitra Perkasa (MMP) pada Januari 2014 lalu.
42		OKTO: BUKAN PENGHENTIAN PENYELIDIKAN (PK,	Penanganan kasus 26 dari 52 orang calon TKI yang diduga ilegal oleh Polda tidak ada tekanan dari pihak lain, termasuk polisi. Dalam penanganan kasus 26 orang calon TKI yang direkrut PT Malindo Mitra Perkasa tidak ada batas waktu sehingga penyidik Polda NTT

		HAL.7)	mengoptimalkan penyelidikan sebagai upaya tindakan preventif. Dan, setiap penanganan kasus, baik penyelidikan maupun penyidikan ada standar operasional prosedur (SOP). Demikian Kapolda NTT Brigjen Polisi I Ketut Untung Yoga Ana, melalui Kabid Humas AKBP Okto G Riwu, SH. Selasa (2/9/2014). Menurut Okto, penanganan kasus 52 calon TKI oleh Polda NTT baru pada tahap penyelidikan. Jika dihentikan, lanjutnya, itu karena tidak ditemukan adanya perbuatan pidana dan tidak didukung alat bukti.
43	SELASA, 2 SEPTEMBER 2014	10 RIBU TANDA TANGAN DUKUNG RUDY SOIK (VN, HAL. 1)	Dukungan masyarakat terhadap Brigadir Polisi (Brigpol) Rudy Soik yang berani melawan atasannya, Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda NTT Komisaris besar (Kombes) Polisi Mochammad Slamet, terus mengalir. Lewat petisi <i>online</i> yang dirilis oleh situs <i>Change.org</i> , dukungan terhadap perjuangan Brigpol Rudy Soik dalam upaya memerangi perdagangan orang ( <i>human trafficking</i> ) tersebut, datang dari seluruh Indonesia. Bahkan dari masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri. “Sejak di buka 24 Agustus sampai malam ini (kemarin), telah masuk lebih dari 10 ribu tanda tangan. Dari luar negeripun ada. Mereka semuanya prihatin dengan perjuangan Brigpol Rudy,” ungkap Eddy Messakh, penyelenggara petisi kepada VN, Senin (1/9).
44		SUARA-SUARA DUKUNGAN UNTUK BRIGPOL RUDI SOIK (VN, HAL.3)	Perjuangan Brigpol Rudy Soik melawan mafia penjualan manusia yang di duga berada dalam tubuh Kepolisian Daerah (Polda) NTT mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik dari NTT maupun dari luar NTT. Dalam kolom komentar di media <i>online</i> situs <i>change.org</i> terkait kasus <i>human trafficking</i> di NTT yang disuarakan Brigpol Rudy Soik, para pengunjung situ <i>change.org</i> , juga menulis alasan mendukung Rudy Soik – Sarah Lery mboeik. Salah satunya menulis, “Manusia tanpa hati sejatinya dia karnivoara (hewan pemakan daging).”
45		MASALAH TRAFFICKING PR BAGI DEWAN BARU (VN, HAL.3)	Anggota DPRD Provinsi NTT periode 2014-2019 yang kan di lantik pada Rabu, 3 September nanti di minta untuk memperhatikan masalah <i>trafficking</i> . Karena persoalan <i>trafficking</i> mencerminkan kegagalan pemerintah NTT dalam men-sejahtera-kan masyarakat NTT. Apalagi, korban <i>trafficking</i> adalah anak-anak yang berasal dari pelosok NTT yang tingkat ekonominya di bawah garis kemiskinan dan pendidikan sangat rendah. Pemerintah Provinsi NTT diminta untuk menyediakan dan membuka lapangan kerja sehingga dapat mengeliminir tindakan penjualan manusia NTT keluar daerah.
46		POLRES KUPANG KOTA LANJUTKAN	Tim penyidik kepolisian Resor (Polres) Kupang Kota telah menggelar perkembangan penyelidikan kasus dugaan perdagangan manusia terhadap 11 calon tenaga kerja

		KASUS CALON TKI PT MALINDO (PK, HAL 7)	Indonesia (TKI) yang di tampung PT Malindo Mitra Perkasa (MMP). Hasilnya, tim kan terus melanjutkan penyelidikan dengan mengumpulkan bahan dan keterangan untuk menuntaskan kasus tersebut. Kapolres Kupang Kota AKBP Tito Basuki Prayitno, yang di konfirmasi melalui Wakapolres Kupang Kota, Komisaris Polisi (Kopol) Yulian Perdana mengatakan hal itu saat di hubungi Pos Kupang senin (1/9/2014).
47	SENIN, 1 SEPTEMBER 2014	PERIKSA DIRKRIMUM POLDA NTT (PK, HAL. 1 & 7)	Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) asal daerah pemilihan NTT, Sarah Lery Mboeik, meminta Divisi Provesi Dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri memeriksa Direktur Reserse dan Kriminal Umum (Dirkrimum) Komisaris Besar Polisi (Kombespol) Sam Kawengian. Permintaan Sarah terkait pernyataan Kombes Pol. Sam Kawengian, bahwa Propam Mabes Polri telah mengklarifikasi Laporan Brigadir Polisi (Brigpol) Rudy Soik, terkait penghentian penyelidikan kasus 52 calon tenaga kerja Indonesia (TKI) yang di tampung PT Malindo Mitra Perkasa (MMP). Seperti yang di beritakan Pos Kupang, (30/8/2014) Sam dalam penjelasannya pada Pos Kupang, Jumat, (28/8/2014) menyampaikan bahwa hasil klarifikasi dan pemeriksaan yang dilakukan Propam Mabes Polri menunjukan tidak ada unsur pidana dalam kasus yang dilaporkan Brigpol Rudy Soik.
48		SAM: APA SALAH SAYA (PK, HAL 1 & 7)	Direktur Reserse Dan Kriminal Umum Polda NTT Kombespol Sam Kawengian, mempertanyakan kasus TKI mana yang tidak serius ditangani jajarannya. Pernyataan itu menanggapi permintaan anggota DPD RI asal NTT Sarah Lery Mboeik, perlu memeriksa Dikirimum Polda NTT, Kombes Pol Sam Kawengian. Kombespol sam meminta Sarah Lery Mboeik untuk menunjukan kasus TKI mana yang tidak di tindak lanjuti jajarannya terkait persoalan TKI di NTT. "Apa salah saya. Semua laporan tentang kasus TKI yang di laporkan kepada Polda NTT," tegas Sam kepada Pos Kupang, Sabtu (30/8/2014).
49		RUDI SOIK DIKENAKAN TINDAKAN DISIPLIN (PK, HAL 1 & 7)	Kapolres Timor Tengah Selatan (TTS) Agus Hermawan, S. IK, mengatakan Brigadir Polisi (Brigpol) Rudy Soik akan dikenakan tindakan disiplin karna meninggalkan tugas tanpa alasan. Agus menjelaskan selama 20 hari lebih Rudy tidak menjalankan tugas sebagai anggota Polres TTS. "Soik melaporkan diri sebagai anggota polres TTS pada 18 Juni 2014, setelah melapor dia meninggalkan tugas dan baru muncul pada tanggal 9 Juli 2014 melaksanakan PAM Pilpres, setelah itu menghilang kembali sehingga akumulasi tidak menjalankan tugas lebih dari 20 hari. Kami akan proses dengan tindakan disiplin," kata Agus yang di hubungi Pos Kupang, Sabtu, (30/8/2014).
50		DUKUNG RUDI	Langkah anggota Polda NTT Brigpol Rudy Soik melaporkan atasannya ke Mabes Polri,

		BONGKAR MAFIA TRAFFICKING (VN, HAL.1)	Komisi Polisi Nasional (Kopolnas) dan komnas HAM harus di dukung oleh seluruh elemen masyarakat NTT untuk membongkar mafia perdagangan manusia ( <i>human trafficking</i> ) bertopeng pengiriman TKI yang diduga melibatkan oknum anggota Kepolisian. Demikian penegasan Sekertaris Pusat Kajian dan Advokasi Masyarakat (Pusam) Indonesia, Oscar Vigator Wolo dan anggota DPR RI asal NTT Sarah Lery Mboeik yang di hubungi VN secara terpisah Minggu, (31/8).
--	--	---	---